

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat
P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMETAAN SOSIAL EKONOMI

Muhammad Fadhli, Yulia Annisa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: yulia.annisa@uin-suska.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran penting, dampak serta implikasi partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial ekonomi terhadap keberhasilan proyek-proyek pembangunan di Desa Ganting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemetaan sosial yaitu sebagai validator data yang membantu memastikan keakuratan informasi yang terkumpul. Urgensi partisipasi masyarakat dalam proses ini terlihat dari pentingnya mencapai pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga desa. Dampak dari partisipasi masyarakat termasuk peningkatan kualitas pembangunan, pemberdayaan lokal, dan legitimasi serta dukungan proyek-proyek pembangunan dari komunitas. Implikasi dari partisipasi masyarakat termasuk perlunya pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pengembangan kebijakan dan strategi, serta pentingnya memprioritaskan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dari proses pemetaan sosial ekonomi.

Kata kunci: Pemetaan Sosial Ekonomi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Pemberdayaan Lokal.

Abstract

This paper aims to examine the important role, impact and implications of community participation in socio-economic mapping on the success of development projects in Ganting Village. The research method used in this research is a qualitative approach using observation, interviews and document analysis methods. Based on the results of research and analysis, it is concluded that the community has a very important role in social mapping, namely as data validators who help ensure the accuracy of the information collected. The urgency of community participation in this process can be seen from the importance of achieving inclusive, equitable and sustainable development for all village residents. The impacts of community participation include improving the quality of development, local empowerment, and legitimizing and supporting development projects from the community. The implications of community participation include the need for an inclusive and participatory approach in developing policies and strategies, as well as the importance of prioritizing community participation as an important part of the socio-economic mapping process.

Keywords: Economic Social Mapping, Community Participation, Sustainable Development, Local Empowerment.

Pendahuluan

Desa Ganting menghadapi berbagai tantangan yang nyata, seperti keterbatasan infrastruktur yang mencakup aksesibilitas transportasi yang buruk, listrik, dan ketersediaan air bersih yang terbatas bagi masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Kampar merupakan perantau dari luar provinsi Riau yang masih tinggal di rumah papan. Ketimpangan ekonomi juga menjadi isu signifikan, di mana sebagian penduduk masih berjuang dengan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, terlihat dari perbedaan pendapatan antara petani dan pelaku usaha kecil lainnya serta distribusi manfaat yang tidak merata dari sektor pertanian atau perkebunan tertentu. Selain itu, ketergantungan pada sektor pertanian atau perkebunan seperti karet atau kelapa sawit membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan pasar, membatasi peluang usaha yang lebih luas dan berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah kualitas pendidikan yang masih rendah, masyarakat dengan ekonomi rendah tentunya tidak dapat melanjutkan Pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi serta lebih memilih untuk. Fakta-fakta ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial ekonomi, karena dengan melibatkan mereka, data yang lebih akurat dan detail dapat dikumpulkan, solusi yang diusulkan lebih relevan dengan kebutuhan riil, dan kebijakan yang diterapkan lebih inklusif serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa suara mereka didengar, kebutuhan mereka dipahami, dan potensi lokal mereka dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Pemetaan sosial atau *social mapping* merupakan sebuah pendekatan penting dalam menganalisis dan memetakan berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Wahyudi et al., 2016) berpendapat bahwa melakukan pemetaan sosial memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya untuk memahami situasi sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki situasi sosial yang unik, yang kemudian berkontribusi pada keragaman masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Menurut Bahrudin dalam (Sudiar et al., 2023) *social mapping* memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai daerah yang sedang dipetakan. Informasi ini mencakup aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan sosial, jaringan interaksi sosial, kekuatan dan kepentingan individu-individu tersebut dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya

meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Hal ini juga mencakup permasalahan sosial yang ada, termasuk kelompok rentan yang ada, serta potensi yang tersedia, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, aspek finansial, serta infrastruktur dan aspek modal sosial.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan *social mapping* menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan yang lebih *inklusif* dan berkelanjutan. Masyarakat menjadi narasumber langsung dalam menggali potensi-potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga rencana pembangunan dapat lebih relevan dan berbasis pada kebutuhan *riil* masyarakat. Dengan demikian, kegiatan *social mapping* ekonomi menjadi sarana yang efektif dalam memajukan perekonomian masyarakat setempat, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini senada dengan pendapat (Handayani & Cahyono, 2014; Sukaris, 2019; SUPRIADI, 2017) bahwa dalam pelaksanaan *social mapping*, maka hal yang diperlukan ialah pemetaan partisipatif melibatkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pada daerah pengembangan. Hal ini karena masyarakatlah yang lebih tau secara mendalam dengan wilayahnya.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam *social mapping* juga berperan dalam memperkuat kapasitas lokal. Dalam proses berinteraksi dengan para ahli, akademisi, dan pihak terkait lainnya, warga desa akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan analitis, *kreativitas*, serta pemahaman tentang berbagai isu yang relevan. Proses ini akan memperkuat pilar-pilar pembangunan berkelanjutan, seperti partisipasi aktif, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup. Tidak hanya memberikan manfaat lokal, partisipasi masyarakat dalam *social mapping* juga menjadi langkah menuju kesetaraan akses dan kesempatan bagi seluruh warga desa (Haris et al., 2023) (Sukaris, 2019). Dalam proses ini, berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dengan demikian, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan, dan kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses *social mapping* ini memiliki peran yang tak tergantikan dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada dalam masyarakat,

menggalang sumber daya lokal, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih *inklusif* dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan di *era globalisasi* ini, partisipasi masyarakat dalam *social mapping* menjadi sebuah keharusan. Melibatkan warga desa, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga non-pemerintah secara aktif dalam proses ini dapat membuka pintu informasi yang berharga, serta memperoleh pemahaman yang lebih *komprehensif* tentang kondisi dan potensi wilayah. Sejalan dengan pendapat (Sukaris, 2019; Wahyudi et al., 2016) bahwa keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang begitu penting sebagai landasan pembangunan.

Dalam konteks *global* yang semakin terhubung, partisipasi masyarakat dalam *social mapping* juga berkontribusi pada penguatan komunitas lokal dan citra positif di tingkat nasional dan internasional. Data dan informasi yang dihasilkan dari proses *social mapping* dapat digunakan untuk menjalankan program-program pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan sosial dan lingkungan suatu daerah serta akan menjadi sorotan positif sebagai contoh keberhasilan partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan jika berhasil melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemetaan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian terdahulu oleh (Nuryati et al., 2020) menjelaskan bahwa untuk keberhasilan pengembangan usaha Tani polikultur perkebunan terintegrasi (UTPTT) melalui kegiatan *social mapping*, diperlukan peran pemerintah sehingga dapat memberikan akses terhadap berbagai sumber daya seperti lahan, infrastruktur, dan teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Hal ini akan memfasilitasi kelancaran implementasi. Selanjutnya penelitian oleh (Rela, 2023) juga menyebutkan bahwa dalam kegiatan pemetaan sosial diperlukan partisipasi stakeholder atau pemangku kepentingan untuk penguatan kelembagaan dan kemitraan, serta pengembangan dan peningkatan infrastruktur serta peran masyarakat. Dari kedua penelitian diatas, kedua peneliti memusatkan perhatian pada pemetaan sosial dengan melibatkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan. Sedikit sekali para peneliti sebelumnya mengaitkan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan *social mapping*. Kesuksesan pemetaan ini tidak hanya tergantung pada teknisnya, tetapi juga pada keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Tulisan ini akan mengeksplorasi mengapa partisipasi masyarakat krusial dalam pemetaan sosial ekonomi

dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir dari upaya pemetaan dan pembangunan.

Metode

Metode pendekatan pada kajian ini menggunakan studi *kualitatif*. Kajian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan pencarian dan kajian terhadap berbagai sumber informasi, termasuk dokumen dan arsip terkait kegiatan pemetaan sosial sebelumnya di Desa Ganting, serta kebijakan dan regulasi terkait partisipasi masyarakat, *literatur* ilmiah, jurnal *akademis*, laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber online yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan deskriptif dan analisis kualitatif untuk menyusun pemahaman mendalam tentang peran partisipasi masyarakat dalam proses *social mapping* dan *implikasinya* pada pembangunan di wilayah Desa Ganting. Identifikasi dan seleksi dilakukan terkait dengan sumber literatur yang relevan dengan topik *social mapping*, partisipasi masyarakat, serta isu-isu pembangunan di tingkat desa, khususnya di Desa Ganting, Kabupaten Kampar. Sumber tersebut dianalisis, untuk mendapatkan relevansi antara konsep partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *social mapping* di Desa Ganting.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Masyarakat dalam Social Mapping di Wilayah Desa Ganting

Peran masyarakat dalam pemetaan sosial di wilayah Desa Ganting sangat penting dalam menyediakan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial ekonomi lokal. Masyarakat Desa Ganting memiliki pengetahuan yang kaya akan dinamika lokal, yang memungkinkan mereka untuk menjadi penyumbang informasi kunci dalam proses pemetaan tersebut. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya membantu memvalidasi data yang terkumpul, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi komunitas, menentukan prioritas pembangunan, serta memperkuat keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan berkelanjutan. Berikut di paparkan peran masyarakat dalam *social mapping*:

1. Masyarakat sebagai Penyedia Informasi Lokal

Masyarakat Desa Ganting adalah pemangku kepentingan utama yang memiliki kekayaan pengetahuan tak ternilai tentang lingkungan dan kondisi sosial ekonomi

wilayah tersebut. Berdasarkan akses langsung dan pengalaman sehari-hari, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek penting kehidupan di desa, seperti titik-titik penting, karakteristik sumber daya alam, struktur infrastruktur yang ada, dan dinamika sosial yang berlangsung. Informasi ini sering kali tidak terdokumentasi secara menyeluruh dalam sumber data resmi, sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menyusun pemetaan yang akurat dan komprehensif tentang wilayah tersebut (Irmayani et al., 2019).

Partisipasi masyarakat membantu memperkaya pemahaman kolektif tentang tantangan dan potensi dalam pengembangan sosial ekonomi. Melalui keterlibatan mereka, informasi detail yang mungkin terlewat oleh pihak luar dapat terungkap, seperti kondisi spesifik infrastruktur, kualitas air, aksesibilitas transportasi, dan sumber daya ekonomi lokal. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Kampar terdiri dari perantau dari luar provinsi yang menempati rumah papan dan memiliki kondisi hidup yang beragam, dengan beberapa sudah menggunakan listrik dan sebagian lainnya belum. Dusun yang ditinggalkan setelah banjir besar tahun 1980-an merupakan fakta lain dari dinamika sosial yang hanya dapat diketahui secara mendalam melalui pengetahuan masyarakat setempat. Saat ini, dusun tersebut hanya dihuni oleh enam kepala keluarga, dengan beberapa menggunakan listrik dan lainnya tidak, menunjukkan pola adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang sudah berlangsung lama.

Pengetahuan masyarakat juga mencakup detail tentang akses air bersih, di mana rumah-rumah dekat sungai memiliki air yang keruh sementara yang lainnya memiliki air jernih. Informasi ini sangat berharga untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dan relevan dalam upaya perencanaan dan pembangunan (Chambers, 1994; Cooke & Kothari, 2001). Dengan demikian, melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial ekonomi di Desa Ganting tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat tetapi juga memastikan bahwa strategi pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Keterlibatan ini mendukung penciptaan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Validator Data

Melalui partisipasi aktif dalam proses pemetaan, masyarakat memiliki peran penting dalam memvalidasi dan memperbaiki data yang terkumpul. Masyarakat memiliki kapasitas untuk menegaskan keakuratan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak

terlibat dalam pemetaan, sambil memberikan tambahan atau koreksi yang dibutuhkan berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat (Larson & Soto, 2008; Ribot & Peluso, 2003). Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, tetapi juga mengoptimalkan representasi yang akurat tentang realitas sosial ekonomi di wilayah tersebut, memungkinkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan sebenarnya dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat diharapkan mengoptimalkan representasi yang akurat tentang realitas sosial ekonomi di wilayah tersebut. Dengan kata lain, melalui partisipasi masyarakat, data yang dihasilkan mencerminkan secara lebih baik kondisi sebenarnya di lapangan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berdampak pada kualitas data, tetapi juga memengaruhi efektivitas kebijakan dan program pembangunan (Hakim, 2017; Lubis, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemetaan yang lebih akurat dan representative.

3. Membantu Identifikasi Masalah dan Prioritas

Melalui partisipasi aktif, masyarakat memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi komunitas mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proses identifikasi masalah dapat mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal (Cornwall, 2002; Ribot et al., 2006). Misalnya, masyarakat dapat mengidentifikasi tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang kurang memadai, atau bahkan masalah lingkungan seperti kerusakan lingkungan atau kekeringan. Informasi ini kemudian digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengembangan dan pemetaan sosial ekonomi, dengan fokus pada area yang paling membutuhkan perhatian dan intervensi.

Dengan demikian, proses ini tidak hanya mencatat data secara pasif, tetapi juga bertujuan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ini dapat mencakup pengembangan program-program pembangunan, alokasi sumber daya yang lebih efektif, atau bahkan perubahan kebijakan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Melalui pemetaan sosial ekonomi yang berbasis pada partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi nyata dari seluruh komunitas, dengan

demikian memastikan bahwa dampaknya dapat dirasakan secara merata dan positif oleh semua anggota masyarakat (Arnowo, 2020; Dinata, 2021).

4. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan

Proses partisipatif dalam pemetaan sosial sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal. Melalui pelibatan aktif dalam pengumpulan data dan analisis, masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru, meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial ekonomi, dan merasa lebih berdaya dalam proses pembangunan. Proses partisipatif dalam pemetaan sosial tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pengumpulan data, tetapi juga menjadi sebuah kesempatan yang berharga untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal secara lebih luas (Arnowo, 2020; Hendarsah, 2012). Melalui keterlibatan aktif dalam proses pengumpulan data, analisis, serta pengambilan keputusan, masyarakat dapat memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan pengelolaan dan pemetaan wilayah mereka.

Masyarakat dapat belajar tentang teknik pemetaan dan analisis data, serta penggunaan alat dan teknologi terkini yang mendukung proses tersebut. Selain itu, proses partisipatif juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Ini dapat mencakup pemahaman tentang tantangan ekonomi lokal, masalah akses terhadap layanan publik, atau isu-isu lingkungan yang relevan (Arnowo, 2020; Dahlia et al., 2017a). Dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat menjadi lebih terampil dalam mengevaluasi kebutuhan mereka sendiri dan merumuskan solusi yang sesuai dalam proses pembangunan. Lebih jauh lagi, proses partisipatif dapat meningkatkan rasa memiliki dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan, karena masyarakat merasa lebih terlibat dalam membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, partisipasi dalam pemetaan sosial tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis masyarakat, tetapi juga memberikan mereka rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap proses pembangunan di wilayah mereka.

2. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam *Social Mapping* di Wilayah Desa Ganting

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam *social mapping* di Desa Ganting, Kabupaten Kampar, sangatlah nyata dan tak terbantahkan. Dengan melibatkan

masyarakat secara aktif, informasi dan pengetahuan yang diperoleh akan membawa dampak yang signifikan dalam menyongsong masa depan yang lebih *inklusif*, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga desa. Proses pemetaan ekonomi dimulai dengan identifikasi potensi ekonomi di daerah tersebut. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif penduduk setempat dalam mengidentifikasi sumber daya alam, keterampilan lokal, keahlian tradisional, dan peluang ekonomi lainnya yang dapat digali dan dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat menekankan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam setiap tahap pemetaan ekonomi. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi, pertemuan, dan kelompok kerja untuk berbagi pengetahuan lokal, pengalaman, dan pandangan mereka tentang kondisi ekonomi dan potensi wilayah (Cooke & Kothari, 2001; Hendarsah, 2012; Phillips & Pittman, 2008).

Bersama-sama dengan masyarakat, pemetaan ekonomi dan potensi desa Ganting harus dilakukan untuk menilai kondisi ekonomi saat ini dan potensi pengembangan di masa depan. Data dan informasi yang diperlukan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk badan pemerintahan, lembaga riset, atau konsultan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis ekonomi, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait harus bersama-sama mengembangkan rencana aksi untuk mengatasi masalah ekonomi, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah (Subagyo, 2021). Setelah hasil analisis ekonomi diperoleh, peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait menjadi *krusial* dalam mengembangkan rencana aksi (Matheus, 2022). Dalam kerjasama yang erat, mereka bersama-sama merancang langkah-langkah untuk mengatasi masalah ekonomi yang ditemukan, serta memanfaatkan peluang yang ada guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah (Cornwall, 2002; Phillips & Pittman, 2008).

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial dan pengembangan rencana aksi adalah suatu langkah strategis yang sangat krusial. *Pertama*, memastikan kebijakan ekonomi yang dijalankan lebih *inklusif*, mengacu pada kebijakan atau rencana aksi yang memperhitungkan dan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang rentan atau terpinggirkan (Botes & Van Rensburg, 2000). Dengan kata lain, kebijakan atau rencana aksi yang inklusif akan mencoba untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang diabaikan atau

dikesampingkan dalam proses pemetaan dan pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan partisipasi yang setara bagi semua masyarakat.

Kedua, responsif dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan daerah. kebijakan atau rencana aksi yang responsif melibatkan masyarakat akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau politik yang terjadi, serta merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara efisien (Botes & Van Rensburg, 2000). Ini berarti kebijakan atau rencana aksi tersebut memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang diperlukan untuk tetap relevan dan efektif seiring waktu. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, rencana aksi yang dihasilkan akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih akurat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memberikan legitimasi dan dukungan yang lebih kuat terhadap kebijakan ekonomi yang diambil, karena mereka merasa memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Mwanzia & Strathdee, 2016; Opaluwah, 2016; Osei-Hwedie & Osei-Hwedie, 2010; Rietbergen-McCracken, 2011).

Ketiga, Pemetaan yang Lebih Holistik, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aspek-aspek penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dipertimbangkan saat melakukan pemetaan atau penilaian situasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, informasi akan diperoleh lebih lengkap dan representatif tentang keadaan sosial dan ekonomi suatu daerah terungkap. Dengan demikian, partisipasi masyarakat membantu dalam pembentukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi di suatu daerah. Ini bisa mencakup masalah-masalah seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dengan mempertimbangkan pandangan dan pengalaman langsung masyarakat, proses pemetaan menjadi lebih akurat dan relevan dalam mengidentifikasi tantangan serta potensi untuk pengembangan dan perbaikan.

Masyarakat Desa Ganting sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai program-program pemerintah, alokasi anggaran, atau kebijakan-kebijakan ekonomi. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat sulit untuk mengerti dan mengawasi langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian mereka. Akibatnya, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan ekonomi menjadi terhambat. Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan

pengambilan keputusan juga merupakan dampak dari kurangnya pemberdayaan. Jika masyarakat tidak diajak untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi di desa, maka kebijakan dan program yang dijalankan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan untuk meminta masukan, pendapat, dan aspirasi mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga program-program perekonomian yang dijalankan dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Efeknya jika Partisipasi masyarakat rendah, akan dapat menyebabkan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan ekonomi, karena ide-ide dan pandangan masyarakat yang beragam tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan hal ini sejalan dengan pendapat (Rahmawati et al., 2021; Sara et al., 2022) bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan.

3. Dampak dan Implikasi Partisipasi Masyarakat dalam *Social Mapping*

a) Dampak Partisipasi Masyarakat dalam *Social Mapping*

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan:

Melibatkan masyarakat dalam proses pemetaan proyek pembangunan telah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk secara langsung menyampaikan kebutuhan dan aspirasi terhadap infrastruktur dan layanan masyarakat. Fakta konkretnya adalah ketika masyarakat lokal turut menyoroti kebutuhan akan perbaikan jalan menuju kebun atau permintaan akan akses air bersih yang lebih baik di daerah pinggiran Sungai Kampar. Informasi ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk merancang solusi yang tepat sasaran dan efektif. Dengan adanya pemetaan yang melibatkan masyarakat, pengalokasian sumber daya untuk proyek pembangunan menjadi lebih efisien. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur listrik dapat lebih diprioritaskan untuk area-area yang belum memiliki akses listrik, seperti di Dusun Pulau Tengah yang masih ada beberapa rumah yang belum teraliri listrik sejak lama.

Pola pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud sistem pembangunan *bottom up* menurut (Subagyo, 2021) telah terbukti

mampu menciptakan program-program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek pembangunan, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Hasilnya, proyek-proyek yang diimplementasikan cenderung lebih berkelanjutan karena didukung oleh komitmen dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemetaan juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul dari berbagai kepentingan yang berbeda (Laily & Imro'atin, 2015). Misalnya, melalui dialog dan musyawarah, masyarakat dapat menemukan titik temu terkait pemanfaatan lahan atau distribusi sumber daya yang adil. Dengan demikian, pembangunan yang melibatkan masyarakat tidak hanya berfokus pada hasil fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kultural yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, sistem pembangunan *bottom up* yang melibatkan masyarakat ini membuka ruang bagi inovasi dan kreativitas lokal untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dihasilkan bukan hanya bersifat top-down yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

2. Pemberdayaan Lokal

Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, kapasitas lokal diperkuat dan komunitas diberdayakan untuk berperan aktif. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya tentang mendengarkan pendapat masyarakat saja, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan. Hal ini membantu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga lebih

mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemetaan yang dilakukan secara partisipatif, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat merancang program pemberdayaan yang tepat, seperti pelatihan teknik pertanian yang lebih baik untuk mengembangkan mata pencaharian utama masyarakat, seperti perkebunan getah dan sawit, serta pelatihan pengembangan UMKM melalui pelatihan teknis. Data yang dikumpulkan melalui social mapping dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Cornwall, 2002; Ribot et al., 2006), sehingga masyarakat dapat diberdayakan melalui program-program yang lebih tepat sasaran dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas untuk berperan aktif dalam pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

3. Legitimasi dan Dukungan

Partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial juga meningkatkan legitimasi proyek dan dukungan dari komunitas. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki bagian dalam proses, mereka lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi solusi yang dihasilkan dari pemetaan tersebut. Proses partisipatif dalam pemetaan sosial tidak hanya merupakan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan juga menjadi sebuah platform yang memungkinkan penguatan kapasitas masyarakat lokal secara holistic (Laily & Imro'atin, 2015; Mondong, 2013). Melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pemetaan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Melalui diskusi, refleksi, dan pembelajaran bersama, mereka dapat memperkaya wawasan mereka tentang tantangan dan peluang yang dihadapi komunitas mereka.

Selain meningkatkan keterampilan teknis, partisipasi dalam pemetaan sosial juga berpotensi untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara anggota masyarakat (Dahlia et al., 2017b; Deviyanti, 2013). Kolaborasi dalam

mengumpulkan dan menganalisis data memungkinkan terciptanya ruang untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keahlian sehingga menguatkan dukungan masyarakat. Ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas, tetapi juga mendorong terbentuknya jejaring kerja yang kuat yang dapat terus berlanjut setelah selesainya proyek pemetaan. Dengan demikian, proses partisipatif dalam pemetaan sosial tidak hanya memberdayakan individu secara teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas kolektif dan kohesi sosial di tingkat komunitas. Dengan demikian, peran masyarakat dalam pemetaan sosial sangat penting dalam memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan dan berdampak bagi kehidupan nyata komunitas yang terlibat.

b) Implikasi

Dalam mengembangkan kebijakan dan strategi untuk pemetaan sosial ekonomi, stakeholder, pemerintah desa Ganting dan lembaga pembangunan perlu memberikan prioritas pada partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dari proses tersebut. Ini berarti bahwa pendekatan yang inklusif dan partisipatif harus digunakan, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi mitra yang kuat bagi pemerintah Desa Ganting dan lembaga pembangunan dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat yang bermakna (di tingkat kontrol warga dan kemitraan) meningkatkan keberhasilan kebijakan dan program pembangunan (Arnstein, 1969). Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan partisipatif, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga dan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan Menurut (Mansuri, 2013) menemukan bahwa kemitraan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan. Ketika masyarakat dianggap sebagai mitra, bukan hanya sebagai penerima manfaat, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif dan mendukung proyek-proyek pembangunan. Penelitian oleh (Narayan, 2002) dalam *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook* menekankan

bahwa partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial memastikan bahwa kebijakan pembangunan lebih inklusif dan responsif. Ketika kebijakan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi lokal yang teridentifikasi melalui partisipasi masyarakat, hasilnya lebih cenderung berkelanjutan dan adil. Selanjutnya menurut (McGee, 2011) Ketika masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam proses pembangunan, mereka lebih mungkin untuk mendukung dan memelihara proyek tersebut, yang meningkatkan keberhasilan jangka panjang.

Implikasi dari partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial sangatlah signifikan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan ekonomi dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan lebih memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga lebih mungkin untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap proyek-proyek pembangunan, karena masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam proses tersebut.

Simpulan

Partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial memiliki implikasi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi lokal, terutama di wilayah Desa Ganting. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemetaan, informasi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, relevan, dan representatif tentang kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan penyusunan rencana pembangunan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Peran masyarakat dalam pemetaan sosial di Desa Ganting mencakup berbagai aspek, seperti sebagai penyedia informasi lokal, validator data, pembantu dalam identifikasi masalah dan prioritas, serta sebagai agen penguatan kapasitas dan pemberdayaan. Melalui partisipasi aktif dalam pemetaan, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap informasi yang relevan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat desa Ganting.

Referensi

- Arnowo, H. (2020). Pembuatan Peta Tematik Desa Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pertanahan*, 10(2).
- Botes, L., & Van Rensburg, D. (2000). Community participation in development: nine plagues and twelve commandments. *Community Development Journal*, 35(1), 41–58.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Cooke, B., & Kothari, U. (2001). *Participation: The new tyranny?* Zed books.
- Cornwall, A. (2002). Making spaces, changing places: situating participation in development. (*No Title*).
- Dahlia, S., Rosyidin, W. F., & Nurbudiansah, A. D. (2017a). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemetaan Bahaya Banjir Menggunakan Pendekatan Multi Disiplin di Desa Renged Kecamatan Binuang Kabupaten Serang. *Jurnal Geografi Edukasi Dan Lingkungan*, 1, 1, 48–56.
- Dahlia, S., Rosyidin, W. F., & Nurbudiansah, A. D. (2017b). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemetaan Bahaya Banjir Menggunakan Pendekatan Multi Disiplin di Desa Renged Kecamatan Binuang Kabupaten Serang. *Jurnal Geografi Edukasi Dan Lingkungan*, 1, 1, 48–56.
- Deviyanti, D. (2013). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380–394.
- Dinata, A. (2021). PEMETAAN POTENSI DESA BERBASIS PARTISIPATIF MASYARAKAT DI DESA PENANTIAN, KECAMATAN JARAI, KABUPATEN LAHAT. *NGABDIMAS*, 4(02), 90–98.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43.
- Handayani, H. H., & Cahyono, A. B. (2014). Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. *Geoid*, 10(1), 99–103.
- Haris, M., Adilah, A. R., & Laksana, B. I. (2023). TIGA STRATEGI KOMUNITAS GENKOMPAK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PUBLIC SPEAKING GENERASI MUDA. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 123–133.
- Hendarsah, H. (2012). Pemetaan partisipatif ancaman, strategi coping dan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat di

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 318–335.

- Irmayani, N. R., Jayaputra, A., Nainggolan, T., Mujiyadi, B., Erwinsyah, R. G., Suradi, S., Amalia, A. D., Habibullah, H., As' adhanayadi, B., & Iban, A. (2019). *Pemetaan sosial menuju desa berketahanan sosial melalui penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Laily, E. I. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 186–190.
- Larson, A. M., & Soto, F. (2008). Decentralization of natural resource governance regimes. *Annual Review of Environment and Resources*, 33, 213–239.
- Lubis, A. (2009). Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Tabularasa*, 6(2), 181–190.
- Matheus, I. R. (2022). *Analisis potensi wilayah pedesaan: pendekatan efektif dalam perencanaan pembangunan pertanian*. Penerbit Andi.
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1).
- Mwanzia, J. S., & Strathdee, R. C. (2016). *Participatory development in Kenya*. Routledge.
- Nuryati, R., Sulistyowati, L., Setiawan, I., & Noor, T. I. (2020). Pemetaan Sosial (Social Mapping) Masyarakat dalam Upaya Mendukung Pengembangan Usahatani Polikultur Perkebunan Terintegrasi (UTPPT). *Jurnal Agristan*, 2(1).
- Opaluwah, A. O. (2016). Participatory Development: A Tool of Pedagogy. *Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal*, 4(1), 120–139.
- Osei-Hwedie, K., & Osei-Hwedie, B. Z. (2010). Participatory development. In *Social Development* (pp. 71–89). Routledge.
- Phillips, R., & Pittman, R. (2008). *An introduction to community development*. Routledge.
- Rahmawati, R., Mone, A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 590–604.
- Rela, I. Z. (2023). PEMETAAN SOSIAL DAN PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat*, 3(1).

- Ribot, J. C., Agrawal, A., & Larson, A. M. (2006). Recentralizing while decentralizing: how national governments reappropriate forest resources. *World Development*, 34(11), 1864–1886.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Rietbergen-McCracken, J. (2011). *Participatory development planning*. Working Paper, World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS
- Sara, I. M., Setini, M., & Tantra, I. G. L. P. (2022). Sinergi Inovasi, Modal Budaya Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Kesejahteraan Umkm. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(1), 59–77.
- Subagyo, R. A. (2021). Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. *Paradigma*, 10(1).
- Sudiar, S., Daniah, R., Aisyah, A., Purnawarman, A., & Azizah, N. (2023). Implikasi social mapping terhadap human security di kampung Gurimbang. *FORUM EKONOMI*, 25(1), 81–88.
- Sukaris, S. (2019). Social-Mapping Sebagai Landasan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 2(1), 52–61.
- SUPRIADI, Y. N. U. R. (2017). Social Mapping Masyarakat di Kelurahan Batusari Kecamatan Batucapeper Kota Tangerang. *Jurnal MoZaiK*, 9(1), 35–45.
- Wahyudi, A., Handoyo, P., & Sudrajat, A. (2016). *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Universitas Negeri Surabaya.